

# Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kabupaten Bombana

Erlin Hasman<sup>1</sup>, Nofal Supriaddin<sup>2</sup>, Asraf<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam, Enam Kendari

erlinhasman@gmail.com<sup>1</sup>, nofalsupriaddin.stie66@gmail.com<sup>2</sup>, asrafyunus23@gmail.com<sup>3</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kabupaten Bombana. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bombana dilihat dari dimensi Pencapaian tujuan secara keseluruhan telah melakukan pentahapan terkait pelaksanaan SAKIP namun belum optimal dikarenakan masih terfokus dalam memperbaiki tahap dalam aspek perencanaan kinerja terkait pelaksanaan SAKIP dikarenakan masih kurangnya pemahaman OPD dalam menentukan Indikator Kinerja Utamanya. (2) Dilihat dari dimensi Integrasi pada Pemerintah Kabupaten Bombana masih melakukan perbaikan dalam hal pengukuran kinerja dikarenakan indikator kinerja pada beberapa perangkat daerah belum seluruhnya dapat digunakan sebagai tolak ukur setiap pencapaian tujuan atau sasaran kinerja. (3) Dilihat dari dimensi Adaptasi terkait aspek Evaluasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan SAKIP menyatakan bahwa evaluasi antar setiap OPD belum dilakukan dengan optimal serta ketersediaan sarana dan prasarana berbasis IT koneksi belum memadai meskipun peralatan dan perlengkapan kantor sudah memadai. Dan juga masih kurangnya pembinaan terhadap sumber daya manusia yang disebabkan terbatasnya anggaran.

## Article Info

### Article History

Received : Mey12<sup>th</sup>,  
2023  
Revised : July14<sup>th</sup>,  
2023  
Accepted : Agustus  
3<sup>rd</sup>, 2023  
Published : Oktober  
14<sup>nd</sup>, 2023

Copyright © 2023 by  
the author



**Keyword:** *Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*

## PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan menuju terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang merupakan tujuan dari setiap instansi pemerintahan di Indonesia. Agar terciptanya pemerintahan yang baik ini salah satu cara yang dilakukan yaitu perlu adanya sistem pengukuran kinerja yang baik. Seiring berjalannya waktu, pengukuran kinerja pada instansi pemerintahan mengalami perubahan orientasi yaitu pengukuran kinerja yang berorientasi pada input kini bergeser pada pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dalam hal ini diperjelas secara tertulis dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur khusus tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja merupakan garda terdepan dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berkaitan dengan instansi pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk menghasilkan pelayanan publik secara optimal. Untuk mendukung terlaksananya sistem pengukuran kinerja ini maka pemerintahan membuat sistem pengukuran kinerja yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), (Christy et al., 2017).

Pelaksanaan sistem akuntabilitas ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem Perencanaan, Penganggaran dan Sistem Pelaporan Kinerja yang selaras dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Keuangan. Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang baik dan berorientasi hasil, maka Pemerintah harus terlebih dahulu menetapkan hasil yang jelas berupa kondisi yang ingin diwujudkan, menentukan indikator kinerja keberhasilannya yang dapat diukur dan relevan. Selanjutnya, menentukan target dari tiap indikator yang digunakan dengan mempertimbangkan harapan masyarakat dan ketersediaan sumber daya, menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pemerintah juga perlu membangun budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, perlu komitmen dari seluruh komponen pemerintah daerah. Komitmen yang kuat dari pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan *good governance* dan *clean government* di lingkungan kerjanya merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan SAKIP. Pimpinan juga harus mengubah pola pikirnya agar program dan kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan manfaat. Pemerintah Kabupaten Bombana selaku pengemban amanah

masyarakat Kabupaten Bombana melaksanakan kewajiban untuk berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bombana yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Bombana adalah salah satu yang telah menerapkan SAKIP. Kabupaten Bombana mendapat penilaian khusus dari Kemenpan-RB karena pada tahun 2021 lalu Pemerintah Kabupaten Bombana mendapatkan Predikat CC dalam Award SAKIP 2019 yang dilaksanakan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bombana berhasil meningkat karena mendapatkan predikat B pada penghargaan atas prestasi dalam melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja instansi (SAKIP). Dalam Award SAKIP 2022 yang dilaksanakan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Kabupaten Bombana mendapat predikat B dalam mengelola SAKIP. Penilaian dari MENPAN RB ini pada aspek SAKIP menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana beserta dukungan seluruh perangkat daerah menunjukkan komitmen dan konsisten dalam menyusun dan mengawal perencanaan yang berkualitas dan mengimplementasikannya sampai kepada tataran program dan kegiatan yang terselaraskan dengan baik. Mendapat predikat terbaik tentu saja tidak mudah untuk setiap pemerintahan, implementasi SAKIP yang dilaksanakan setiap pemerintah daerah tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan daerah itu sendiri, melainkan juga harus dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong 2002) bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif. Analisis data dilakukan tiga alur yaitu:

1. Reduksi Data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data. Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan peneliti dan juga sebagai suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.
3. Penarikan Kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah kegiatan analisis data yang berlangsung dilapangan maupun setelah selesai dilapangan. Selain itu penarikan kesimpulan sesuai dengan analisis data. Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab-akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki 5 aspek yaitu: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Dalam hal ini dapat dilihat dari teori efektivitas yang dikemukakan Duncan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Berdasarkan hasil diskusi teori dengan temuan dilapangan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Bombana sebagai berikut:

### 1. Perencanaan Kinerja

Dilihat dari aspek perencanaan kinerja terkait pelaksanaan SAKIP dalam hal ini disampaikan dalam Catatan Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan kualitas implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bombana yaitu untuk melakukan reviu dan memperbaiki dokumen perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka menengah maupun perencanaan kinerja jangka pendek, sehingga mewujudkan keselarasan RPJMD, Renstra, PK, dan IKU. Capaian Kinerja dari 6 sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bombana pencapaiannya kurang memuaskan. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana masih terfokus untuk memperbaiki tahap perencanaan dikarenakan masih kurangnya pemahaman OPD dalam menentukan Indikator

Kinerja Utamanya. Dalam hal ini dikaitkan dengan teori Efektivitas yang dikemukakan Duncan dilihat dari dimensi pencapaian tujuan, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin maka diperlukan yang namanya pentahapan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bombana telah melakukan pentahapan pelaksanaan SAKIP yaitu salah satunya perencanaan kinerja yakni rencana strategis, namun masih perlu perbaikan dalam tahap perencanaan dalam hal keselarasan dokumen Renstra dan RPJMD terkait pencapaian target kinerja sasaran untuk pencapaian tujuan.

## 2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja yang akan dicapai, dan akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dari 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Bombana, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 100% atau telah memenuhi kriteria sangat tinggi, sedang dan ada indikator belum ada hasil. Namun dari hasil wawancara menyatakan bahwa dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bombana juga masih melakukan perbaikan dalam hal pengukuran kinerja dikarenakan indikator kinerja pada sebagian perangkat daerah belum seluruhnya dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian setiap tujuan atau sasaran kinerja.

Disesuaikan dengan teori Efektivitas menurut Duncan dilihat dari dimensi integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan juga komunikasi dengan berbagai organisasi lainnya. Secara proses dan prosedur dalam melakukan sosialisasi, terkait pelaksanaan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bombana sudah berjalan, namun tidak berjalan optimal. Disebabkan bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan terbatas dilakukan karena persoalan anggaran yang dibatasi. Sehingga kualitas perencanaan sangat mempengaruhi langkah selanjutnya untuk menjadi tolak ukur keberhasilan, maka dari itu perlu perbaikan dalam aspek perencanaan. Dari hasil penelitian juga ditemukan kendala bahwa respon dari Pimpinan Perangkat Daerah terkait penyelenggaraan SAKIP masih kurang untuk hadir dan hanya mengutus untuk diwakilkan. Dapat dilihat bahwa komitmen perangkat daerah terkait pelaksanaan SAKIP masih belum menjadi prioritas. Sehingga disesuaikan dengan teori efektivitas yang dikemukakan Duncan dapat dilihat bahwa dalam aspek pelaksanaan pengukuran kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bombana dilihat dari dimensi integrasi pada pengembangan konsensus dan komunikasi belum berjalan dengan optimal.

## 3. Pelaporan kinerja

Dalam catatan Menpan menyatakan bahwa Pelaporan kinerja telah disusun beserta setiap OPD namun belum memberikan informasi mengenai analisis faktor pendukung maupun penghambat keberhasilan capaian kinerja. Hal ini mengakibatkan laporan kinerja belum mampu memberikan umpan balik untuk mendorong perbaikan tahun berikutnya. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa prosedur terkait pelaksanaan sakip salah satunya yaitu pelaporan

sudah dilaksanakan sosialisasi terkait penyusunannya namun belum optimal sesuai harapan. Disebabkan oleh bimbingan teknis yang terbatas dilakukan, sehingga hanya dilakukan pendampingan secara mandiri dalam penyusunannya. Terkait dengan Teori Efektivitas menurut Duncan Dilihat dari dimensi integrasi secara proses dan prosedur terkait pelaporan kinerja sudah dilakukan namun masih hanya sekedar formalitas sehingga belum maksimal dalam hal pelaporannya.

#### 4. Evaluasi Kinerja

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah tahun 2022 dari Kemenpan-RB menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana memperoleh predikat B. Kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Bombana sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa hasil evaluasi antar setiap OPD belum dilakukan dengan optimal sehingga masih ada pejabat yang melaksanakan kerjanya namun belum sesuai standar jabatannya. Dalam peningkatan pelaksanaan SAKIP kemampuan daya tangkap SDM menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, dari hasil penelitian upaya yang dilakukan dalam peningkatan SDM terkait pelaksanaan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bombana yaitu dengan melaksanakan Bimtek, Pelatihan, dan Workshop terkait pelaksanaan SAKIP. Dari hasil penelitian juga menyatakan bahwa sarana dan prasarana dari segi peralatan kantor sudah memadai namun yang menjadi kendala adalah ketersediaan sarana berbasis teknologi informasi, sehingga belum bisa menggunakan aplikasi yang dihibahkan oleh Pemerintah Kota Bandung dikarenakan konektivitasnya belum terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Bombana. Dalam hal ini dikaitkan dengan teori Efektivitas menurut Duncan dilihat dari dimensi adaptasi yang menyatakan bahwa tolak ukur efektivitas adalah peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana namun pada Pemerintah Kabupaten Bombana belum dilakukan secara efektif.

#### 5. Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, secara umum Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2022 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, dan masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan pada tahun 2022 dengan berbagai kendala seperti terdapat beberapa pimpinan OPD yang masih belum memahami kinerja dan indikator kinerja yang akan dicapai, serta kualitas indikator kinerja pada sebagian perangkat daerah yang seluruhnya belum dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan setiap sasaran kinerja. Dalam hal ini dikaitkan dengan teori efektivitas menurut Duncan dilihat dari dimensi pencapaian tujuan dalam

penentuan sasaran yang tepat di Pemerintah Kabupaten Bombana masih belum efektif dikarenakan masih perlu mewujudkan keselarasan antara dokumen RPJMD dan Renstra

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bombana dilihat dari dimensi Pencapaian tujuan secara keseluruhan telah melakukan pentahapan terkait pelaksanaan SAKIP namun belum optimal dikarenakan masih terfokus dalam memperbaiki tahap dalam aspek perencanaan kinerja terkait pelaksanaan SAKIP dikarenakan masih kurangnya pemahaman OPD dalam menentukan Indikator Kinerja Utamanya. Dilihat dari aspek Capaian Kinerja dalam penentuan sasaran yang tepat belum dilaksanakan dengan efektif dikarenakan masih perlu mewujudkan keselarasan antara dokumen RPJMD dan Renstra. Dilihat dari dimensi Integrasi pada Pemerintah Kabupaten Bombana masih melakukan perbaikan dalam hal pengukuran kinerja dikarenakan indikator kinerja pada beberapa perangkat daerah belum seluruhnya dapat digunakan sebagai tolak ukur setiap pencapaian tujuan atau sasaran kinerja. Secara proses dan prosedur terkait sosialisasi belum berjalan sesuai harapan, dan salah satu yang menjadi kendala adalah respon dari pimpinan Perangkat Daerah terkait penyelenggaraan SAKIP, sehingga dalam hal pengembangan konsensus dan komunikasi belum optimal. Dilihat dari aspek Pelaporan kinerja secara proses dan prosedur terkait pelaporan kinerja sudah dilakukan namun masih hanya sekedar formalitas sehingga belum maksimal dalam hal pelaporannya. Dilihat dari dimensi Adaptasi terkait aspek Evaluasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan SAKIP menyatakan bahwa evaluasi antar setiap OPD belum dilakukan dengan optimal serta ketersediaan sarana dan prasarana berbasis IT koneksi belum memadai meskipun peralatan dan perlengkapan kantor sudah memadai. Dan juga masih kurangnya pembinaan terhadap sumber daya manusia yang disebabkan terbatasnya anggaran. Dilihat dari dimensi Adaptasi yang menyatakan bahwa tolak ukur efektivitas adalah peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana namun pada Pemerintah Kabupaten Bombana belum dijalankan dengan efektif.

## **REFERENCES**

- Ander, K.L., Ilat, V., & Wokas, H.R.N. 2021. Pengaruh Arus Kas dan Laba Akuntansi terhadap *return* Saham pada Perusahaan Manufaktur di BEI, *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol 9 No1, pp 773.
- Angelia, R., Siagian, J., and Mangani, K.S. 2021. The formation of optimal stocks portfolio using Markowitz, single index, and Capital Asset Pricing Models on LQ45 Index of 2016-2020 period, *Technium Social Sciences Journal* Vol 25, pp 273-288.

- Aslam, A. P., Nisa, N. A., Wilda, W., and Putra, M. A. F. A. 2022. Analysis of the Single Index Model in the Banking Sector in LQ 45 Period 2020-2022, *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika* Vol 19, No 2, pp 131-142.
- Desiyanti, R. 2017. *Teori Investasi dan Portofolio*. Sumbar: Bung Hatta University Press.
- Ditasari, R. A. & Pradana, A. I. 2021. Analysis of Optimal Portfolio Comparison on Shares of Sri Kehati by Using Single Index Model and Random Model, *International Journal of Science, Technology & Management*, Vol 2 No 4, pp 1274.
- Hartono J. 2013. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: Buku Bhakti Profesindo
- Hermawati, R. & Suganjar. 2020. Analisis Pengaruh Motivasi, Kompensasi, dan Pengembangan SDM terhadap Kinerja Anak Buah Kapal Deck Department Melalui Variabel Intervening Kepuasan Kerja, *Majalah Ilmiah Bahari Jogja (MIBJ)*, Vol 18, No 1, p. 1-13.
- Hidayat, W. W. 2020. *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia.